

DPMPTSP
PROV.SULTRA



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disusun dengan baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan Laporan Keuangan tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai. media hubungan kinerja organisasi, serta sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selaku pemberi wewenang.

Selanjutnya kepada semua pihak unit kerja dilingkungan DPMPTSP Prov. Sultra yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 ini diucapkan terima kasih. Namun demikian diharapkan kepada semua pihak walaupun telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih banyak kekuarangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan.

Kendari, 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGARA,**



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
NERACA	vi
LAPORAN OPERASIONAL	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
BAB II KEBIJAKAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	5
2.1. Kebijakan Keuangan	5
2.1.1. Kebijakan Perencanaan	5
2.1.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung	6
2.1.3. Kebijakan Belanja Langsung	6
2.2. Capaian Kinerja Laporan Keuangan.....	7
2.2.1. Laporan Neraca	7
2.2.2. Laporan Operasional	8
2.2.3. Laporan Perubahan Ekuitas	8
2.2.4. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah	10
3.1.2. Kinerja Belanja Daerah	11
3.1.3. Kinerja Belanja Operasional (LO)	11
3.2. Faktor Pendukung, Penghambat dan Kendala Dalam Pencapaian Target	11
3.2.1. Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Keuangan	11
3.2.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Keuangan	12

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)14

3.1.Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos Realisasi Anggaran.....14

3.1.1. Dana Alokasi Khusus (DAK)14

3.1.2. Dana Penyesuaian14

3.1.3. Belanja14

BAB IV PENUTUP 25

A. Kesimpulan 25

B. Saran 25

LAMPIRAN.....

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kendari, 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGARA,**



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

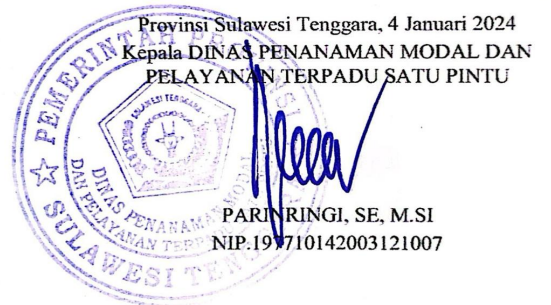
Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	15.451.723.009,93	15.432.255.666,93
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	15.451.723.009,93	15.432.255.666,93
1.3.01	Tanah	8.040.800.000,00	8.040.800.000,00
1.3.01.01	Tanah	8.040.800.000,00	8.040.800.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	8.040.800.000,00	8.040.800.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	8.040.800.000,00	8.040.800.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.315.780.225,73	5.874.972.545,73
1.3.02.01	Alat Besar	35.000.000,00	35.000.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	35.000.000,00	35.000.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	35.000.000,00	35.000.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	955.682.500,00	910.382.500,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	955.682.500,00	910.382.500,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	767.350.000,00	767.350.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	188.332.500,00	143.032.500,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.960.000,00	1.960.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.960.000,00	1.960.000,00
1.3.02.03.02.0001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.960.000,00	1.960.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.147.920.980,00	2.997.503.300,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	880.282.000,00	880.282.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	99.200.000,00	99.200.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	781.082.000,00	781.082.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.853.054.180,00	1.702.636.500,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.001.766.180,00	914.898.500,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	401.165.000,00	354.415.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	500.000,00	500.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	447.823.000,00	432.823.000,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	0,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	414.584.800,00	414.584.800,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	173.499.000,00	173.499.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	65.280.000,00	65.280.000,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	52.539.800,00	52.539.800,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	51.766.000,00	51.766.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	71.500.000,00	71.500.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	524.319.300,00	524.319.300,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.06.01	Alat Studio	431.636.878,67	431.636.878,67
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	431.636.878,67	431.636.878,67
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	92.682.421,33	92.682.421,33
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	62.682.421,33	62.682.421,33
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	3.600.000,00	3.600.000,00
1.3.02.07.02.0001	Alat Kesehatan Matra Laut	3.600.000,00	3.600.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	3.980.000,00	3.980.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	3.980.000,00	3.980.000,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	3.980.000,00	3.980.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.619.317.445,73	1.374.227.445,73
1.3.02.10.01	Komputer Unit	971.893.031,10	785.093.031,10
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	23.009.756,10	23.009.756,10
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	744.883.275,00	617.333.275,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	204.000.000,00	144.750.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	647.424.414,63	589.134.414,63
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	5.600.000,00	5.600.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	213.224.000,00	213.224.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	241.640.000,00	208.350.000,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	161.960.414,63	161.960.414,63
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000,00	0,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.02.15.02.0006	Alat Pelindung Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	6.340.317.116,00	5.697.523.500,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	6.207.456.624,00	5.697.523.500,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.207.456.624,00	5.697.523.500,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.189.934.585,00	5.141.266.300,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	97.937.500,00	0,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	703.971.039,00	505.498.200,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	164.854.500,00	0,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	50.759.000,00	50.759.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	132.860.492,00	0,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	132.860.492,00	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	132.860.492,00	0,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.790.000,00	36.790.000,00
1.3.04.03	Instalasi	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.04.04	Jaringan	11.790.000,00	11.790.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	1.790.000,00	1.790.000,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	1.790.000,00	1.790.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	2.450.000,00	2.450.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	450.000,00	450.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	450.000,00	450.000,00
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	450.000,00	450.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	164.939.000,00	164.939.000,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	164.939.000,00	164.939.000,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	164.939.000,00	164.939.000,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	164.939.000,00	164.939.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.449.353.331,80)	(4.385.219.378,80)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.328.015.047,80)	(3.895.667.367,80)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(985.174.347,80)	(552.826.667,80)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(985.174.347,80)	(552.826.667,80)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.227.418.459,00)	(2.227.418.459,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.906.347.817,00)	(1.906.347.817,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(321.070.642,00)	(321.070.642,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.115.422.241,00)	(1.115.422.241,00)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(1.115.422.241,00)	(1.115.422.241,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.113.118.712,00)	(481.332.439,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.113.118.712,00)	(481.332.439,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.113.118.712,00)	(481.332.439,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(8.219.572,00)	(8.219.572,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(7.046.738,00)	(7.046.738,00)
1.3.07.03.01.0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	(7.046.738,00)	(7.046.738,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1.172.834,00)	(1.172.834,00)
1.3.07.03.02.0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(1.172.834,00)	(1.172.834,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH ASET TETAP	15.451.723.009,93	15.432.255.666,93
		0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	15.451.723.009,93	15.432.255.666,93
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	315.848.922,00	183.028.376,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	315.848.922,00	183.028.376,00
2.1.06	Utang Belanja	315.848.922,00	183.028.376,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	265.232.235,00	126.444.926,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	265.232.235,00	126.444.926,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	265.232.235,00	126.444.926,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.457.468,00	1.085.250,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	4.457.468,00	1.085.250,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.457.468,00	0,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	1.085.250,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.159.219,00	55.498.200,00
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	46.159.219,00	55.498.200,00
2.1.06.08.01.0025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	46.159.219,00	55.498.200,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	315.848.922,00	183.028.376,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	315.848.922,00	183.028.376,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	15.154.555.044,93	15.249.227.290,93
3.1	EKUITAS	15.154.555.044,93	15.249.227.290,93
3.1.01	Ekuitas	2.799.512.316,93	1.998.536.751,93
3.1.01.01	Ekuitas	15.249.227.290,93	14.393.710.979,93
3.1.01.01.01	Ekuitas	15.249.227.290,93	14.393.710.979,93
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	15.249.227.290,93	14.393.710.979,93
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(12.449.714.974,00)	(12.395.174.228,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(12.449.714.974,00)	(12.395.174.228,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(12.449.714.974,00)	(12.395.174.228,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.355.042.728,00	13.250.690.539,00
3.1.03.01	RK PPKD	12.355.042.728,00	13.250.690.539,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	12.355.042.728,00	13.250.690.539,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	12.355.042.728,00	13.250.690.539,00
	JUMLAH EKUITAS	15.154.555.044,93	15.249.227.290,93

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15.470.403.966,93	15.432.255.666,93



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	12.844.893.358	12.373.723.685,00	96,33	13.250.690.539,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.684.969.808	11.243.421.494,00	96,22	11.529.711.939,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.455.357.595	5.205.015.618,00	95,41	5.353.263.488,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.634.776.400	3.474.921.535,00	95,60	3.503.645.355,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.813.568.800	2.725.659.500,00	96,88	2.755.778.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.813.568.800	2.725.659.500,00	96,88	2.755.778.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	290.955.000	262.862.069,00	90,34	256.044.216,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	290.955.000	262.862.069,00	90,34	256.044.216,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	262.220.000	241.670.000,00	92,16	241.700.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	262.220.000	241.670.000,00	92,16	241.700.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.450.000	82.445.000,00	88,22	85.765.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	93.450.000	82.445.000,00	88,22	85.765.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	168.304.080	157.730.760,00	93,72	160.844.820,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	168.304.080	157.730.760,00	93,72	160.844.820,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.125.300	4.518.711,00	88,16	3.478.146,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.125.300	4.518.711,00	88,16	3.478.146,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.153.220	35.495,00	3,08	34.873,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.153.220	35.495,00	3,08	34.873,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.674.871.195	1.584.384.083,00	94,60	1.677.658.133,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.656.532.630	1.566.809.633,00	94,58	1.677.658.133,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.656.532.630	1.566.809.633,00	94,58	1.677.658.133,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	18.338.565	17.574.450,00	95,83	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	18.338.565	17.574.450,00	95,83	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.710.000	145.710.000,00	100,00	171.960.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	145.710.000	145.710.000,00	100,00	123.960.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	137.550.000	137.550.000,00	100,00	115.800.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.229.612.213	6.038.405.876,00	96,93	6.176.448.451,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.013.630.998	946.658.800,00	93,39	919.403.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.013.630.998	946.658.800,00	93,39	919.403.600,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	35.085.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.005.000	41.600.000,00	83,19	14.205.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111.982.000	107.560.000,00	96,05	81.755.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.054.150	12.532.000,00	96,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	245.277.448	226.889.800,00	92,50	215.871.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.600.000	5.050.000,00	66,45	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.944.400	8.700.000,00	97,27	17.960.600,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0	0,00	0,00	7.930.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	0,00	0,00	2.800.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	149.400.000	149.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	8.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	363.568.000	331.320.000,00	91,13	314.840.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.000.000	31.807.000,00	99,40	76.342.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	31.800.000	31.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0,00	0,00	45.750.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00	56.364.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0	0,00	0,00	37.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.286.164.943	3.272.468.438,00	99,58	3.606.410.638,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.186.164.943	3.172.468.438,00	99,57	3.556.410.638,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	121.824.760	119.224.760,00	97,87	77.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.600.000	56.600.000,00	100,00	31.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0	0,00	0,00	32.527.140,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.000.000	54.000.000,00	100,00	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000.000	298.998.000,00	99,67	195.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500.000.000	499.911.000,00	99,98	675.080.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.890.000.000	1.889.000.000,00	99,95	2.303.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	600.000	225.564,00	37,59	1.350.498,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	130.100.183	129.197.086,00	99,31	114.655.700,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000	1.000.000,00	83,33	900.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.150.000	24.312.028,00	78,05	20.397.300,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	690.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	135.646.000	91.375.000,00	67,36	246.185.307,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.670.000	58.475.000,00	56,95	89.247.807,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	56.800.000	22.300.000,00	39,26	55.107.794,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	3.540.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.370.000	7.665.000,00	73,92	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.000.000	25.000.000,00	100,00	9.170.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	0,00	0,00	21.430.013,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.500.000	3.510.000,00	33,43	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.976.000	32.900.000,00	99,77	156.937.500,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	32.976.000	32.900.000,00	99,77	156.937.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.794.170.272	1.727.903.638,00	96,31	1.404.448.906,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.794.170.272	1.727.903.638,00	96,31	1.404.448.906,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.787.220.272	1.723.253.638,00	96,42	1.343.968.906,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.950.000	4.650.000,00	66,91	60.480.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.684.969.808	11.243.421.494,00	96,22	11.529.711.939,00
5.2	BELANJA MODAL	1.159.923.550	1.130.302.191,00	97,45	1.720.978.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.819.050	440.807.680,00	95,87	384.622.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	52.000.000	45.300.000,00	87,12	22.650.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	52.000.000	45.300.000,00	87,12	22.650.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.000.000	45.300.000,00	87,12	22.650.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	154.819.050	150.417.680,00	97,16	76.049.800,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	154.819.050	150.417.680,00	97,16	69.049.800,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	91.269.050	86.867.680,00	95,18	21.249.800,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	46.750.000	46.750.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000	15.000.000,00	100,00	47.800.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000	1.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	187.673.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	187.673.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00	187.673.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	253.000.000	245.090.000,00	96,87	98.250.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	194.500.000	186.800.000,00	96,04	98.250.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	135.000.000	127.550.000,00	94,48	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59.500.000	59.250.000,00	99,58	98.250.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	58.500.000	58.290.000,00	99,64	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	33.500.000	33.290.000,00	99,37	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.104.500	689.494.511,00	98,48	1.336.355.800,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	560.104.500	549.641.362,00	98,13	1.336.355.800,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	560.104.500	549.641.362,00	98,13	1.336.355.800,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	82.498.200	82.276.485,00	99,73	886.355.800,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	80.000.000	79.937.500,00	99,92	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	220.606.300	210.884.577,00	95,59	450.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	177.000.000	176.542.800,00	99,74	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	140.000.000	139.853.149,00	99,90	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	140.000.000	139.853.149,00	99,90	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	140.000.000	139.853.149,00	99,90	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.159.923.550	1.130.302.191,00	97,45	1.720.978.600,00
	JUMLAH BELANJA	12.844.893.358	12.373.723.685,00	96,33	13.250.690.539,00
	SURPLUS/DEFISIT	(12.844.893.358)	(12.373.723.685,00)	96,33	(13.250.690.539,00)

Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Januari 2024
Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


PARN RINGI, SE, M.SI
NIP.19710142003121007





PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	12.449.714.974,00	12.395.174.228,00	54.540.746,00	0,44
8.1	BEBAN OPERASI	11.385.581.021,00	11.477.672.115,00	(92.091.094,00)	(0,80)
8.1.01	Beban Pegawai	5.343.802.927,00	5.362.975.914,00	(19.172.987,00)	(0,36)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.474.921.535,00	3.503.645.355,00	(28.723.820,00)	(0,82)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.725.659.500,00	2.755.778.300,00	(30.118.800,00)	(1,09)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.725.659.500,00	2.755.778.300,00	(30.118.800,00)	(1,09)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	262.862.069,00	256.044.216,00	6.817.853,00	2,66
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	262.862.069,00	256.044.216,00	6.817.853,00	2,66
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	241.670.000,00	241.700.000,00	(30.000,00)	(0,01)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	241.670.000,00	241.700.000,00	(30.000,00)	(0,01)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	82.445.000,00	85.765.000,00	(3.320.000,00)	(3,87)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.445.000,00	85.765.000,00	(3.320.000,00)	(3,87)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	157.730.760,00	160.844.820,00	(3.114.060,00)	(1,94)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	157.730.760,00	160.844.820,00	(3.114.060,00)	(1,94)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.518.711,00	3.478.146,00	1.040.565,00	29,92
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.518.711,00	3.478.146,00	1.040.565,00	29,92
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	35.495,00	34.873,00	622,00	1,78
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	35.495,00	34.873,00	622,00	1,78
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.723.171.392,00	1.687.370.559,00	35.800.833,00	2,12
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.705.596.942,00	1.687.370.559,00	18.226.383,00	1,08
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.705.596.942,00	1.687.370.559,00	18.226.383,00	1,08
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	17.574.450,00	0,00	17.574.450,00	100,00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	17.574.450,00	0,00	17.574.450,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.710.000,00	171.960.000,00	(26.250.000,00)	(15,27)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	145.710.000,00	123.960.000,00	21.750.000,00	17,55
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	137.550.000,00	115.800.000,00	21.750.000,00	18,78
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.041.778.094,00	6.114.696.201,00	(72.918.107,00)	(1,19)
8.1.02.01	Beban Barang	946.658.800,00	919.403.600,00	27.255.200,00	2,96
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	946.658.800,00	919.403.600,00	27.255.200,00	2,96
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	35.085.000,00	(35.085.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.600.000,00	14.205.000,00	27.395.000,00	192,85
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	107.560.000,00	81.755.500,00	25.804.500,00	31,56
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.532.000,00	0,00	12.532.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	226.889.800,00	215.871.500,00	11.018.300,00	5,10
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.050.000,00	5.000.000,00	50.000,00	1,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.700.000,00	17.960.600,00	(9.260.600,00)	(51,56)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	7.930.000,00	(7.930.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	149.400.000,00	0,00	149.400.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	331.320.000,00	314.840.000,00	16.480.000,00	5,23
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.807.000,00	76.342.000,00	(44.535.000,00)	(58,34)
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	31.800.000,00	0,00	31.800.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	45.750.000,00	(45.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	56.364.000,00	(56.364.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	0,00	37.100.000,00	(37.100.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.275.840.656,00	3.607.495.888,00	(331.655.232,00)	(9,19)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	3.175.840.656,00	3.557.495.888,00	(381.655.232,00)	(10,73)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	119.224.760,00	77.600.000,00	41.624.760,00	53,64
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.600.000,00	31.400.000,00	25.200.000,00	80,25
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	0,00	32.527.140,00	(32.527.140,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	298.998.000,00	195.500.000,00	103.498.000,00	52,94
8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	499.911.000,00	675.080.000,00	(175.169.000,00)	(25,95)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.889.000.000,00	2.303.000.000,00	(414.000.000,00)	(17,98)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	225.564,00	1.350.498,00	(1.124.934,00)	(83,30)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	133.654.554,00	114.655.700,00	18.998.854,00	16,57
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	11,11
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.226.778,00	21.482.550,00	1.744.228,00	8,12
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0037	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	91.375.000,00	183.347.807,00	(91.972.807,00)	(50,16)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.475.000,00	89.247.807,00	(30.772.807,00)	(34,48)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.300.000,00	55.107.794,00	(32.807.794,00)	(59,53)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	3.540.000,00	(3.540.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.665.000,00	0,00	7.665.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.000.000,00	9.170.000,00	15.830.000,00	172,63
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	21.430.013,00	(21.430.013,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.900.000,00	94.100.000,00	(61.200.000,00)	(65,04)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	32.900.000,00	94.100.000,00	(61.200.000,00)	(65,04)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.727.903.638,00	1.404.448.906,00	323.454.732,00	23,03
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.727.903.638,00	1.404.448.906,00	323.454.732,00	23,03
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.723.253.638,00	1.343.968.906,00	379.284.732,00	28,22
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.650.000,00	60.480.000,00	(55.830.000,00)	(92,31)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	11.385.581.021,00	11.477.672.115,00	(92.091.094,00)	(0,80)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.064.133.953,00	917.502.113,00	146.631.840,00	15,98
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	432.347.680,00	825.876.188,00	(393.528.508,00)	(47,65)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	432.347.680,00	85.763.214,00	346.584.466,00	404,12
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	432.347.680,00	85.763.214,00	346.584.466,00	404,12
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	554.224.429,00	(554.224.429,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	468.975.462,00	(468.975.462,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	85.248.967,00	(85.248.967,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	0,00	185.888.545,00	(185.888.545,00)	(100,00)
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	185.888.545,00	(185.888.545,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	631.786.273,00	90.453.091,00	541.333.182,00	598,47
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	631.786.273,00	90.453.091,00	541.333.182,00	598,47
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	631.786.273,00	90.453.091,00	541.333.182,00	598,47
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.172.834,00	(1.172.834,00)	(100,00)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	1.172.834,00	(1.172.834,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.03.02.0045	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	1.172.834,00	(1.172.834,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.064.133.953,00	917.502.113,00	146.631.840,00	15,98
	JUMLAH BEBAN	12.449.714.974,00	12.395.174.228,00	54.540.746,00	0,44
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.449.714.974,00)	(12.395.174.228,00)	(54.540.746,00)	0,44

Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Januari 2024
Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PARINRINGI, SE, M.SI
NIP.197710142003121007



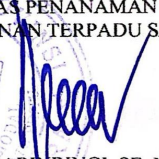
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	15.249.227.290,93	14.393.710.979,93
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(12.449.714.974,00)	(12.395.174.228,00)
RK PPKD	12.355.042.728,00	13.250.690.539,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	(17.092.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	17.092.000,00
EKUITAS AKHIR	15.154.555.044,93	15.249.227.290,93

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Januari 2024
Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PARIN RRINGI, SE, M.SI
NIP.19710142003121007



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknis pelaksanaan kedua undang-undang tersesubut selanjutnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri tersebut, kesemuanya mengarah pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selaku Entitas Akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan Keuangan (LKPD) juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membiayai aktivitasnya.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.)
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akraul pada Pemerintah Daerah;
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023;

BAB II

KEBIJAKAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Pokok-pokok kebijakan didalam penyusunan LKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 secara umum meliputi kebijakan perencanaan pendapatan daerah, belanja daerah baik belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.1.1. Kebijakan Perencanaan

Asumsi makro ekonomi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan biaya yang cukup besar dalam upaya memacu pembangunan, sehingga perlu menggali Pendapatan Daerah terutama untuk memajukan investasi daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.

Kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi Sulawesi Tenggara bersumber dari objek-objek pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Untuk mendorong peningkatan investasi ini, Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengisyaratkan adanya reformasi birokrasi dalam pelayanan investasi yaitu diterapkannya sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu, untuk dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah yang mengakomodasi dengan tuntutan dunia usaha.

Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara memegang peran yang cukup penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah investor yang menanamkan modalnya menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tentunya kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, dan dibutuhkan langkah dan strategi yang jitu, terutama upaya promosi dan kemudahan dalam pengurusan perizinan, untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Daerah Sulawesi Tenggara.

2.1.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang di Kelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi belanja pegawai dan Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) . Kebijakan untuk belanja tidak langsung tahun 2023, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2023 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, access dan kenaikan tunjangan-tunjangan.
2. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS di tahun 2023 naik rata-rata sebesar 75% dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2023. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur melalui aplikasi e-kinerja (aplikasi simponi) dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini merupakan rintisan bagi pemberlakuan remunerasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.1.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Penganggaran Belanja Langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2023 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2023.
2. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.
3. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien.
4. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional di Tahun 2023.
5. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Kebijakan Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Penambahan, pengurangan, dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
 - a) Program/kegiatan yang berasal dari APBD TA 2023.
 - b) Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi.
 - c) Program/kegiatan yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
 - d) Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023.
 - e) Kewajiban Pemerintah terhadap keputusan pengadilan yang harus dilaksanakan terkait dengan pengembalian barang bukti Kejaksaan.
2. Pelaksanaan program/kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2023.

2.2. Capaian Kinerja Laporan Keuangan

Capaian Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Laporan Keuangan tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai. capaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2023 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

- 1) Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 mencapai 0% dari anggarannya.
- 2) Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12.373.042.685,00 atau mencapai 96,33% dari anggaran yang tersedia. Rp. 12.844.893.358,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.471.850.673,00

2.2.1. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2023 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 15.451.723.009,93 yang terdiri dari :

- a) Aset lancar sebesar Rp. ,00,
- b) Investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00,
- c) Aset tetap sebesar Rp. 15.451.723.009,93
- d) Dana cadangan Rp. 0,00
- e) Aset lainnya sebesar Rp. 0,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 315.848.922,00 yang terdiri dari :

- a) Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. Rp. 315.848.922,00
- b) Kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 15.154.555.044,93
Sehingga Jumlah Kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 15.470.403.966,93

2.2.2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

- a) Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp. 0,00,
- b) Beban dari kegiatan Operasional Rp. 12.449.714.974,00 dan
- c) Surplus/defisit sebesar Rp. (12.449.714.974,00)

2.2.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir. Yang terdiri :

- a) Ekuitas awal sebesar Rp. 15.249.227.290,93
- b) Surplus/Defisit Rp. (12.449.714.974,00) dan
- c) Ekuitas akhir sebesar Rp. 15.154.555.044,93

2.2.4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pendapatan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu dimana pada tahun 2022 mendapat realisasi anggaran sebesar (Rp. 13.250.690.539,00), Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 12.373.723.685,00 atau turun sebesar 7,09% dari realisasi tahun 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp (12.844.893.358) yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Operasi (sesuai di Laporan SIPD)	11.684.969.808
2.	Belanja Modal (sesuai di Laporan SIPD)	1.159.923.550
	Surplus/(Defisit)	12.844.893.358

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja			
	▪ Belanja Operasi	11.684.969.808	11.243.421.494	96,22
	▪ Belanja Modal	1.159.923.550	1.130.302.191	97,45
	Total Belanja	12.844.893.358,-	12.373.723.685,-	96,33

3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Capaian kinerja anggaran belanja daerah selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 mencapai Rp 12.373.723.685,00 atau turun sebesar 7.08 % dari tahun 2022, yakni hanya mencapai Rp. 13.250.690.539,00.

Kinerja masing-masing kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1. Kinerja Belanja Operasi (LO)

Belanja operasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) suku cadang, (4) belanja bahan bakar, (5) belanja makan minum, (6) belanja sewa, dan (7) belanja pemeliharaan (8) Belanja Perjalanan Dinas. Perkembangan realisasi belanja operasi tahun 2021, 2022 dan 2022 cukup mengalami kenaikan dimana Belanja Operasi pada Tahun 2022 Sebesar Rp. 11.545.158.659,00. Dan pada tahun 2023 turun 2,61% dengan penurunan sebesar Rp. Rp. 11.243.421.494,00

3.2. Faktor Pendukung, Penghambat dan Kendala Dalam Pencapaian Target

2.2.1. Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Keuangan

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

- Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan

dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.

3. Semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta instansi vertikal lainnya.
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pula kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

3.2.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Keuangan

Secara umum hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

1. Uang persediaan yang diberikan terbilang masih kurang, sehingga tidak mampu menyerap secara maksimal kegiatan dan anggaran yang cepat.
2. Adanya penurunan anggaran yang diberikan di tahun 2023 sehingga terjadi penurunan serapan anggaran dibandingkan dengan tahun 2022.
3. Adanya kegiatan yang tidak terencana dengan baik, sehingga serapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak terserap dengan baik. Sehingga menimbulkan anggaran tersisa meskipun program kegiatannya telah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan.
4. Masih kurangnya koordinasi lintas internal kantor, sehingga tidak termanajemen dengan baik kegiatan-kegiatan yang perlu pendampingan dan pengarahan yang baik dari pimpinan.
5. Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusi, sehingga tidak memungkinkan kegiatan bisa terselesaikan dengan baik. Dan pengetahuan ASN yang terbilang masih kurang dan memerlukan pelatihan khusus terkait tupoksi dari masing-masing bidang kegiatan.
6. Kurangnya partisipasi dari tenaga teknis dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak memungkinkan kegiatan bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
8. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan time schedule yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
9. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja keuangan lainnya karena adanya ketidaksinkronan pedoman dan regulasi pelaksanaan baik dari pemerintah pusat dan

propinsi yang dikeluarkan setelah APBD ditetapkan. Hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan aturan di atasnya.

Secara khusus hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

Dalam pencapaian target secara khusus dalam proses pengelolaan keuangan kami masih terdapat beberapa kendala terlebih dengan pemberlakuan istem keuangan daerah yang berbasis online sistem pada awal tahun 2022-2023 yang mengharuskan kami selaku pengelola keuangan dituntut untuk tahu dan memahami secara cepat tentang bagaimana proses dan prosedur yang diterapkan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga kami dibuat sedikit kesulitan diawal pemberlakuan aplikasi SIPD dimana kami harus menyesuaikan diri secara teknis dari pola lama yang diterapkan pada aplikasi SIMDA ke aplikasi SIPD. Sehingga tidak bisa dipungkiri ada beberapa kegiatan yang sempat kami imput terjadi kesalahan penganggaran dan salah pemilihan kode rekening karena salah klik dan salah menentukan kegiatan saat melakukan imput data sehingga terjadi pertukaran anggaran antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya.

Berbagaia permasalahan tidak bisa dipungkiri bahwa DPMPTSP hingga hari ini masih kekurangan tenaga teknis khusus menangani pengelolaan keuangan meskipun secara personil mencukupi tapi secara SDM yang ada tidak mempunyai atau tidak memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi keuangan sehingga permasalahan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa kegiatan dan pelaporan yang harusnya dikerjakan oleh beberapa orang tapi harus dikerjakan oleh satu orang saja demi memburu target waktu yang telah ditetapkan oleh BPKAD.

BAB IV

PENJELASAN POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos Realisasi Anggaran

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

3.1.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 1.013.158.760,00 atau 92.92% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2023 sebesar Rp 1.090.300.000,00 mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.

3.1.2 Dana Penyesuaian.

Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00. Sedangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00.

3.1.3 Belanja

3.1.3.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.455.357.595,00 atau 95,41% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.205.015.618,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Pegawai TA. 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.455.357.595	5.205.015.618,00	95,41
Belanja Gaji Pokok ASN	3.634.776.400	3.474.921.535,00	95,60
Belanja Gaji Pokok PNS	2.813.568.800	2.725.659.500,00	96,88
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.813.568.800	2.725.659.500,00	96,88
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	290.955.000	262.862.069,00	90,34
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	290.955.000	262.862.069,00	90,34
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	262.220.000	241.670.000,00	92,16

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.450.000	82.445.000,00	88,22
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	93.450.000	82.445.000,00	88,22
Belanja Tunjangan Beras ASN	168.304.080	157.730.760,00	93,72
Belanja Tunjangan Beras PNS	168.304.080	157.730.760,00	93,72
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.125.300	4.518.711,00	88,16
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.125.300	4.518.711,00	88,16
Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.153.220	35.495,00	3,08
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.153.220	35.495,00	3,08
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.674.871.195	1.584.384.083,00	94,60
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.656.532.630	1.566.809.633,00	94,58
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.656.532.630	1.566.809.633,00	94,58
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	18.338.565	17.574.450,00	95,83
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	18.338.565	17.574.450,00	95,83
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.710.000	145.710.000,00	100,00
JUMLAH	5.455.357.595,00	5.205.015.618,00	96,22%

3.1.3.2. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 11.529.711.939,00 atau 92,18% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.507.954.933,00. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Operasi TA. 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	5.455.357.595	5.205.015.618,00	95,41
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.634.776.400	3.474.921.535,00	95,60
Belanja Gaji Pokok ASN	2.813.568.800	2.725.659.500,00	96,88
Belanja Gaji Pokok PNS	2.813.568.800	2.725.659.500,00	96,88
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	290.955.000	262.862.069,00	90,34
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	290.955.000	262.862.069,00	90,34
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	262.220.000	241.670.000,00	92,16

Belanja Tunjangan Jabatan PNS	262.220.000	241.670.000,00	92,16
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	93.450.000	82.445.000,00	88,22
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	93.450.000	82.445.000,00	88,22
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	168.304.080	157.730.760,00	93,72
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	168.304.080	157.730.760,00	93,72
Belanja Tunjangan Beras ASN	5.125.300	4.518.711,00	88,16
Belanja Tunjangan Beras PNS	5.125.300	4.518.711,00	88,16
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.153.220	35.495,00	3,08
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.153.220	35.495,00	3,08
Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.674.871.195	1.584.384.083,00	94,60
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.656.532.630	1.566.809.633,00	94,58
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.656.532.630	1.566.809.633,00	94,58
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	18.338.565	17.574.450,00	95,83
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.338.565	17.574.450,00	95,83
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.710.000	145.710.000,00	100,00
Belanja Honorarium	145.710.000	145.710.000,00	100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	137.550.000	137.550.000,00	100,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	6.229.612.213	6.038.405.876,00	96,93
Belanja Barang	1.013.630.998	946.658.800,00	93,39
Belanja Barang Pakai Habis	1.013.630.998	946.658.800,00	93,39
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.005.000	41.600.000,00	83,19
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	111.982.000	107.560.000,00	96,05
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.054.150	12.532.000,00	96,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	245.277.448	226.889.800,00	92,50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.600.000	5.050.000,00	66,45
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.944.400	8.700.000,00	97,27
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	262.220.000	241.670.000,00	92,16

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	149.400.000	149.400.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	363.568.000	331.320.000,00	91,13
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.000.000	31.807.000,00	99,40
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.800.000	31.800.000,00	100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	0	0,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	0	0,00	0,00
Belanja Jasa	3.286.164.943	3.272.468.438,00	99,58
Belanja Jasa Kantor	3.186.164.943	3.172.468.438,00	99,57
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	121.824.760	119.224.760,00	97,87
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.600.000	56.600.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.000.000	54.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000.000	298.998.000,00	99,67
Belanja Jasa Tenaga Supir	100.000.000	100.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	0,00	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	500.000.000	499.911.000,00	99,98
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.890.000.000	1.889.000.000,00	99,95
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	600.000	225.564,00	37,59
Belanja Tagihan Telepon	130.100.183	129.197.086,00	99,31
Belanja Tagihan Listrik	1.200.000	1.000.000,00	83,33
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	31.150.000	24.312.028,00	78,05
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	690.000	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	100.000.000	100.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000	100.000.000,00	100,00

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	56.800.000	22.300.000,00	39,26
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.370.000	7.665.000,00	73,92
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.000.000	25.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000	3.510.000,00	33,43
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	32.976.000	32.900.000,00	99,77
Belanja Perjalanan Dinas	32.976.000	32.900.000,00	99,77
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.794.170.272	1.727.903.638,00	96,31
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.794.170.272	1.727.903.638,00	96,31
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.787.220.272	1.723.253.638,00	96,42
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.950.000	4.650.000,00	66,91
JUMLAH	11.684.969.808	11.243.421.494,00	96,22

3.1.3.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.471.069.801,00 atau 65,40 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.307.522.209,00.. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Modal TA. 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.819.050	440.807.680,00	95,87
Belanja Modal Alat Angkutan	52.000.000	45.300.000,00	87,12
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	52.000.000	45.300.000,00	87,12
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.000.000	45.300.000,00	87,12

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	154.819.050	150.417.680,00	97,16
Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	154.819.050	150.417.680,00	97,16
Belanja Modal Mebel	91.269.050	86.867.680,00	95,18
Belanja Modal Alat Pendingin	46.750.000	46.750.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000	15.000.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000	1.800.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	253.000.000	245.090.000,00	96,87
Belanja Modal Komputer Unit	194.500.000	186.800.000,00	96,04
Belanja Modal Personal Computer	135.000.000	127.550.000,00	94,48
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59.500.000	59.250.000,00	99,58
Belanja Modal Peralatan Komputer	58.500.000	58.290.000,00	99,64
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	33.500.000	33.290.000,00	99,37
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000	25.000.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.104.500	689.494.511,00	98,48
Belanja Modal Bangunan Gedung	560.104.500	549.641.362,00	98,13
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	560.104.500	549.641.362,00	98,13
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	82.498.200	82.276.485,00	99,73
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	80.000.000	79.937.500,00	99,92
Belanja Modal Bangunan Terbuka	220.606.300	210.884.577,00	95,59
Belanja Modal Bangunan Parkir	177.000.000	176.542.800,00	99,74
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	140.000.000	139.853.149,00	99,90
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	140.000.000	139.853.149,00	99,90

Belanja Modal Pagar	140.000.000	139.853.149,00	99,90
JUMLAH	1.159.923.550	1.130.302.191,00	97,45

3.1.3.4. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 6.176.448.451,00 atau 91,17 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.774.324.910,00. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Barang dan Jasa TA. 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Barang	1.013.630.998	946.658.800,00	93,39
Belanja Barang Pakai Habis	1.013.630.998	946.658.800,00	93,39
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.005.000	41.600.000,00	83,19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111.982.000	107.560.000,00	96,05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.054.150	12.532.000,00	96,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	245.277.448	226.889.800,00	92,50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.600.000	5.050.000,00	66,45
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.944.400	8.700.000,00	97,27
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	149.400.000	149.400.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	363.568.000	331.320.000,00	91,13

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.000.000	31.807.000,00	99,40
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	31.800.000	31.800.000,00	100,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	0	0,00	0,00
Belanja Jasa	3.286.164.943	3.272.468.438,00	99,58
Belanja Jasa Kantor	3.186.164.943	3.172.468.438,00	99,57
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	121.824.760	119.224.760,00	97,87
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.600.000	56.600.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.000.000	54.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000.000	298.998.000,00	99,67
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	100.000.000	100.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0	0,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500.000.000	499.911.000,00	99,98
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.890.000.000	1.889.000.000,00	99,95
Belanja Tagihan Telepon	600.000	225.564,00	37,59
Belanja Tagihan Listrik	130.100.183	129.197.086,00	99,31
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000	1.000.000,00	83,33
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.150.000	24.312.028,00	78,05
Belanja Paket/Pengiriman	690.000	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	100.000.000,00	100,00

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000	100.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	135.646.000	91.375.000,00	67,36
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.670.000	58.475.000,00	56,95
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	56.800.000	22.300.000,00	39,26
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.370.000	7.665.000,00	73,92
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.000.000	25.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.500.000	3.510.000,00	33,43
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.976.000	32.900.000,00	99,77
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	32.976.000	32.900.000,00	99,77
Belanja Perjalanan Dinas	1.794.170.272	1.727.903.638,00	96,31
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.794.170.272	1.727.903.638,00	96,31
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.787.220.272	1.723.253.638,00	96,42
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.950.000	4.650.000,00	66,91
JUMLAH	6.229.612.213	6.038.405.876,00	96,93

Sumber: LRA DPMPTSP 2023

3.1.3.5. Kas

1. Kas di Kas Daerah

Jumlah saldo Kas di Kas DPMPTSP 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan saldo hasil rekonsiliasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Kas di Kas OPD
(dalam rupiah)

Uraian	Nama Rekening (Nomor Rekening)	31/12/2023	31/12/2023
Bank Sultra	Rek. Kas Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (001.01.02.000141-8)	0,00	0,00
Selisih Pencairan SP2D		(0,00)	(0,00)
Jumlah		0,00	0,00

Jumlah saldo Kas di Kas DPMPTSP tersebut terdiri dari saldo pada Rekening Kas DPMPTSP pada Bank Sultra sebesar Rp 0,00, dikurangi selisih pencairan SP2D sebesar Rp 0,00.

Selain Kas di Kas DPMPTSP tersebut, perlu kami informasikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat temuan kelebihan pemotongan pajak Penghasilan (PPh pasal 21) kepada PNS Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang disetor ke Kas Daerah.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 yang merupakan sisa uang persediaan dan tambahan persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah.

3. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 merupakan sisa kas di bendahara penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku entitas akuntansi T.A 2023 sebagai bahan kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGARA,**



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja keuangan pemerintah daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu dimana pada tahun tahun 2022 memperoleh realisasi anggaran sebesar (Rp. 13.250.690.539,00), Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan realaisasi anggaran sebesar Rp 12.373.723.685,00 atau turun sebesar 7,09 % dari realisasi tahun 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp. 12.844.893.358 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp14.317.740.583,00 Hal tersebut di atas juga berdampak pada kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA dengan capaian sebesar 9,2 Triliun atau 42% dari target 21,73 T yang diberikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Realisasi selanjutnya, Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 juga mengalami penurunan 2 tahun terakhir sebesar Rp. 6.038.405.876,00 atau 96,93% dari target anggaran yang diberikan sebesar Rp. 6.229.612.213,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 6.176.448.451,00 atau 91,17 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.774.324.910,00.

Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 juga mengalami penurunan dimana ditahun 2022 sebesar Rp. 5.353.263.488,00 sedangkan di tahun 2023 hanya mampu menyerap anggaran sebesar 5.205.015.618,00 atau 95,41% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.455.357.595,00. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pegawai dengan status pensiun pada akhir tahun 2022.

B. SARAN

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik DPMPTSP Prov. Sultra perlu meningkatkan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan realisasi investasi dan serapan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan OPD teknis terkait selaku penyelenggara layanan juga membutuhkan dukungan regulasi yang memberi kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada investor dan masyarakat khususnya pengurus izin selaku pengguna layanan.

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan setidaknya 8 pegawai dengan kualifikasi komputer, akuntansi, dan hukum untuk menggenjot optimalisasi kinerja, mengingat jumlah SDM yang tersedia belum memadai dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas. Pegawai yang ada juga perlu memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis serta perubahan *mindset* dan *cultureset* sesuai tuntutan reformasi birokrasi termasuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan profesional.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja Keuangan OPD sepanjang tahun 2023, sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan program dan kegiatan serta perumusan langkah-langkah strategis pada tahun mendatang.

Kendari, 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGARA,**



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007